

**DAMPAK PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN PERKOTAAN
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA MISKIN DI
KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG**

***THE IMPACT OF URBAN POVERTY ASSISTANCE PROGRAM ON THE
INCREASE OF POOR HOUSEHOLD INCOME IN ENREKANG DISTRICT OF
ENREKANG REGENCY***

AHMAD NUR



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**DAMPAK PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN PERKOTAAN
TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA MISKIN
DI KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG**

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Disusun dan diajukan oleh

AHMAD NUR

kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

Tesis

**DAMPAK PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN PERKOTAAN
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA MISKIN
DI KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan diajukan oleh

AHMAD NUR

Nomor Pokok P0306205504

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 20 Juni 2007

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU
Ketua

Dr. Paulus Uppun, MA
Anggota

Ketua Program Studi
Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,

Dr. Ir. Didi Rukmana, M.Sc

Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Nur
Nomor Pokok : P0306205504
Program Studi : Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)
Konsentrasi : Perencanaan Kependudukan dan SDM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Juni 2007

Yang Menyatakan,

Ahmad Nur

PRAKATA

Atas rahmat dan rahim Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang dinamai tesis dengan judul : Dampak Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan terhadap Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar khususnya pada Konsentrasi Magister Perencanaan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal yang patut disadari dan disyukuri bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, terutama berkaitan dengan keterbatasan pribadi peneliti. Namun, berkat niat baik dan bantuan dari berbagai pihak terutama Bapak Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU sebagai Ketua Komisi Penasihat dan Bapak Dr. Paulus Uppun, MA sebagai Anggota Komisi Penasihat dengan ketulusan hati membimbing penulis ditengah-tengah kesibukan yang cukup menyita waktu, akhirnya tesis ini dapat dirampungkan penulisannya.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini pula kami haturkan banyak terima kasih masing-masing kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, atas penyediaan sarana dan prasarana perkuliahan yang memadai, khususnya pada Konsentrasi Perencanaan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia.

2. Bapak Dr. Ir. Didi Rukmana, M.Sc Ketua Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU Ketua Konsentrasi Perencanaan Kependudukan dan SDM atas prakarsanya menjalin kerjasama dengan BKD Provinsi Sulawesi Selatan sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan.
4. Bapak, Ibu para dosen dan staf program pascasarjana pada Konsentrasi Perencanaan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia.
5. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati Enrekang, Kepala BKD Kabupaten Enrekang, atas kesempatan dan bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan dengan baik, serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
6. Yang istimewa kepada istri tercinta Arianti Martin dan anak-anakku tersayang Daffa Madania Alifah dan Abiyyu Zuhair sebagai sumber motivasi dan inspirasi yang mendorong penyelesaian studi saya.

Terakhir, atas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan semua pihak, mudah-mudahan mendapat balasan serta pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin

Makassar, 20 Juni 200

Penulis,

Ahmad Nur. *Dampak Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan terhadap Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang (dibimbing oleh H. M. Tahir Kasnawi dan Paulus Uppun).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapatan rumah tangga miskin sebelum dan sesudah digulirkannya program pengentasan

kemiskinan perkotaan dan untuk mengetahui hubungan faktor umur, pendidikan, jumlah tanggungan, pengalaman usaha, bantuan modal usaha, dan biaya pengeluaran usaha dengan peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.

Lokasi penelitian di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, dengan jumlah populasi sebanyak seribu dua ratus enam puluh enam orang. Teknik sampling yang digunakan adalah *cluster sampling* sehingga diperoleh tujuh puluh lima responden dari hasil pemilihan secara acak. Data dianalisis dengan menggunakan analisis *chi-square* dan uji-t.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan perkotaan melalui bantuan modal usaha dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, ditandai dengan perbedaan signifikan antara pendapatan rumah tangga miskin sebelum mengikuti program dan sesudah mengikuti program dimaksud di Kecamatan Enrekang. Faktor umur pada aktifitas ekonomi merupakan prasyarat utama dan berhubungan erat dengan peningkatan pendapatan. Jumlah tanggungan mempunyai hubungan positif dengan pendapatan karena memberi motivasi untuk lebih aktif dalam kegiatan ekonomi. Demikian pula faktor pendidikan, pengalaman usaha, bantuan modal serta pengeluaran usaha mempunyai hubungan nyata dan cukup berarti dengan peningkatan pendapatan. Sementara, peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi tidak bergantung kepada jenis usaha yang ditekuni.

Kata kunci : *Kemiskinan, bantuan modal usaha, pendapatan.*

ABSTRACT

Ahmad Nur . *The Impact of Assistance Program on City Poorness towards the Increase of Poorness Household Income in Enrekang Regency* (supervised by H. M. Tahir Kasnawi and Paulus Uppun).

The aim of this research was to know the difference of poor household income before and after following the assistance program of city poorness and to know the relationship of age factor, education, number of dependant, business experience, capital assistance, and business expending cost with the increase of poor household income.

The research location was carried out in Enrekang District, Enrekang Regency with total population amount 1266 persons. The technique of sample selection was *cluster sampling* so it was obtained 75 respondents from random sampling method. The obtained data then analyzed by using *chi-square* and *t-test* analysis.

The results showed that the assistance program of city poorness through business capital assistance can increase the income of poor household, marked with the significant different between poor household income before and after following the program in Enrekang district. Age factor on the economy activity was the main requirement and possessing the closely relationship with the increase of income. Total dependant had the positive relationship between the income by giving the motivation to be more active in the economy activity. It also occurred with the education factors, business experience, capital assistance and business expense possessing the significant relationship with the income. Meanwhile the opportunity to obtain the higher income were not depend on the type of business.

Key words : *Poorness, business capital assistance, income*

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Konsep Kemiskinan	7
B. Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan	11
C. Keaktifan Keluarga dalam Mengelola Usaha	13
D. Konsep Pendapatan	18
E. Kerangka Pikir.....	20
F. Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Populasi dan Sampel.....	26

D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Analisis Data	28
F. Definisi Operasional.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	35
B. Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan.....	42
C. Karakteristik Responden	44
D. Analisis Deskriptif Ekonomi Rumah Tangga	
Penerima Bantuan Modal P2KP	56
E. Pengujian Hipotesis Perbedaan Peningkatan	
Pendapatan Sebelum dan Sesudah Menerima	
Bantuan Modal.....	62
F. Analisis Faktor-faktor yang Berhubungan dengan	
Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Penyebaran populasi keluarga miskin di kecamatan enrekang	27
2. Penyebaran populasi sasaran dan besarnya sampel	27
3. Banyaknya kelurahan/desa dan luas wilayah di kecamatan enrekang	37
4. Jumlah penduduk kecamatan enrekang menurut jenis kelamin Dan kelurahan/desa	38
5. Penduduk kecamatan enrekang menurut kelompok umur	39
6. Banyaknya rumah tangga, rumah tangga miskin, dan penduduk Miskin di kecamatan enrekang	40
7. Potensi ekonomi menurut sektor perdagangan dan jasa	41
8. Jumlah penerima bantuan modal pinjaman bergulir pada tiap Kelurahan/desa	44
1. Distribusi responden menurut kelompok umur	45
2. Distribusi responden menurut tingkat pendidikan	48
3. Distribusi responden menurut jumlah tanggungan	49
4. Distribusi responden menurut lama menekuni usaha	51
5. Distribusi responden menurut modal usaha	52
6. Distribusi responden menurut pengeluaran biaya usaha	53
7. Distribusi responden menurut jenis usaha	55
8. Distribusi responden menurut pendapatan suami sebelum dan sesudah menerima bantuan	57

9. Distribusi responden menurut pendapatan istri sebelum dan Sesudah menerima bantuan.....	59
18. Rata-rata pendapatan suami, istri, rumah tangga responden Perbulan sebelum dan sesudah menerima bantuan.....	63
19. Hasil uji perbedaan rata-rata pendapatan peserta sebelum dan sesudah mendapat bantuan modal.....	66
20. Hubungan antara umur dan pendapatan.....	67
21. Hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan	70
22. Hubungan antara jumlah tanggungan dan pendapatan.....	74
23. Hubungan antara pengalaman usaha dan pendapatan.....	76
24. Hubungan antara modal usaha dan pendapatan.....	78
25. Hubungan antara biaya usaha dan pendapatan.....	81
26. Hubungan antara jenis usaha dan pendapatan.....	83
27. Rekapitulasi hasil perhitungan chi-square beberapa faktor yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Hasil uji perbedaan rata-rata pendapatan rumah tangga miskin sebelum dan sesudah mengikuti program P2KP.....	92
2. Hasil olah data SPSS faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.....	93
3. Hasil analisis chi-square hubungan antara umur dan pendapatan	95
4. Hasil analisis chi-square hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan.....	96
5. Hasil analisis chi-square hubungan antara jumlah tanggungan dan pendapatan.....	97
6. Hasil analisis chi-square hubungan antara pengalaman usaha dan pendapatan.....	98
7. Hasil analisis chi-square hubungan antara modal usaha dan pendapatan.....	99
8. Hasil analisis chi-square hubungan antara biaya usaha dan pendapatan.....	100
1. Hasil analisis chi-square hubungan antara jenis usaha dan pendapatan.....	101
2. Kuesioner penelitian dampak program pengentasan kemiskinan perkotaan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997 telah membawa perubahan yang sangat berarti dalam tata perekonomian negara ini. Lambatnya pemulihan ekonomi menjadikan rakyat sebagai korban terparah. Dampak langsung dari krisis ini adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin. Laporan Bank Dunia 2000/2001 berjudul *Attacking Poverty* cukup mengejutkan, lantaran jumlah orang miskin Indonesia tahun 1999 mencapai 66,1 %. Dengan jumlah penduduk yang waktu itu mencapai 207 juta jiwa, jumlah orang miskin di Indonesia menurut ukuran Bank Dunia sekitar 136,8 juta jiwa.

Bank Dunia mengolah data ini dari survey ekonomi rumah tangga yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam laporan itu yang disajikan data-data kemiskinan resmi pemerintah. Menurut data resmi pemerintah yang memakai standar nasional, penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan besarnya 11,3 % tahun 1996 dan terus meningkat menjadi 20,3 % tahun 1998. Jumlah kaum miskin malah semakin membengkak tahun 1999 menjadi 66,1 %. Rupanya batas kemiskinan yang dipakai Bank Dunia berbeda dengan standar masing-masing negara. Indonesia, khususnya batas kemiskinannya lebih rendah.

Melihat angka-angka kemiskinan tersebut pemerintah tentu tidak tinggal diam. Berbagai kebijakan strategis yang dikemas dalam bentuk paket program sebenarnya telah diluncurkan pemerintah. Dimulai dengan diluncurkannya Program Daerah untuk Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) tahun 1999, kemudian disusul Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), RASKIN, serta berbagai paket program dan bantuan lainnya.

Namun, wacana tentang penanggulangan kemiskinan masih tetap ramai diperbincangkan dan dipublikasikan, tidak hanya akibat makin meningkatnya jumlah keluarga miskin yang salah satu penyebabnya adalah akibat krisis ekonomi yang berdampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara minimal. Sehingga penyaluran bantuan baik bantuan langsung maupun sifatnya pinjaman dana dari pemerintah tetap menjadi kebutuhan mereka guna melakukan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan taraf kesejahteraannya.

Terlepas dari dampak positif yang diharapkan dan telah dirasakan dari program-program tersebut, terjadi pula akibat samping yang tidak dapat dihindari, yakni ketimpangan pendapatan dan ketidakberdayaan lapisan sosial masyarakat pada lapisan bawah yang termanifestasikan dalam bentuk kemiskinan multidimensional, sehingga kemiskinan tetap menjadi perbincangan dan topik utama pembangunan. Hal yang tak kalah

menarik pula yakni adanya indikasi kebocoran di sana sini dan akhirnya menjadi salah sasaran serta dinikmati oleh orang yang tidak berhak.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut menjadi prioritas pemerintah, ditandai dengan amanat UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Propenas. Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan dari 19 % (38,7 juta jiwa) tahun 2000 menjadi 14 % (26,8 juta jiwa) tahun 2004 melalui dua strategi pendekatan yakni; pertama, mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dan kedua, meningkatkan pendapatan penduduk miskin melalui pengembangan usaha ekonomi produktif.

Salah satu bentuk kebijakan yang diterapkan berupa kebijakan subsidi pangan terarah (*targeted food subsidy*) berupa transfer pendapatan (*income transfer*) dalam bentuk barang masih sangat diperlukan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, namun tetap tidak menunjukkan perbaikan perekonomian dalam pelaksanaan aktivitas kesehariannya.

Pada sisi lain (Todaro, 2004) terdapat perbedaan pendapat yang menjadi dilematis bagi pemerintah bahwa pengeluaran publik yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan akan mengurangi dana yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pendapat yang mengatakan bahwa konsentrasi penuh untuk mengurangi kemiskinan akan memperlambat tingkat pertumbuhan sebanding dengan argumen yang menyatakan bahwa derajat ketimpangan yang rendah akan

mengalami tingkat pertumbuhan yang lambat juga, khususnya jika terjadi redistribusi pendapatan atau asset dari orang kaya ke orang miskin.

P2KP hadir dalam posisi netral menjawab serangkaian pro maupun kontra penanggulangan kemiskinan membawa solusi dalam mengatasi kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan. Bentuk upaya penanggulangan kemiskinan lain yang diterapkan mulai pada tahun 2002 di Kabupaten Enrekang, yakni Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Perkotaan (P2KP) dengan asumsi bahwa kemiskinan tidak identik pada masyarakat pedesaan saja, tetapi kenyataannya juga mulai bergeser ke wilayah perkotaan. Masalah sosial, ekonomi, politik dan lingkungan hidup berdampak pada fenomena kemiskinan di perkotaan, termasuk kemiskinan materi karena kurangnya pendapatan untuk kebutuhan makan dan perumahan. P2KP melakukan pendekatan dan memandang kemiskinan dari sudut yang berbeda dari program-program lainnya. Kemiskinan hanya dapat diatasi apabila ditunjang oleh orang-orang yang baik, jujur dan murni.

Salah satu akar penyebab kemiskinan adalah lunturnya nilai-nilai universal kemanusiaan atau aspek moral (jujur, adil, ikhlas/kerelawanan) serta pudarnya prinsip-prinsip kemasyarakatan atau aspek *good governance* (partisipasi, demokrasi, transparansi, akuntabilitas). Sehingga orientasi pelaksanaan P2KP sebagai wujud pembangunan berkelanjutan bertumpu pada Tridaya, yakni pertama, daya pembangunan sosial; kedua, daya pembangunan lingkungan; dan ketiga, daya pembangunan ekonomi.

Keberadaan P2KP di Kabupaten Enrekang, khususnya di Kecamatan Enrekang telah berjalan sejak tahun 2002 dengan alokasi bantuan dana sebesar Rp. 1.800.000.000,- yang diperuntukkan bagi keluarga miskin (Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I) yang tersebar pada 12 kelurahan/desa diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat melepaskan diri dari kemiskinan. Sejalan dengan uraian di atas, mendorong peneliti untuk melihat dampak program pengentasan kemiskinan perkotaan (P2KP) terhadap peningkatan pendapatan keluarga miskin di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dan memperhatikan ruang lingkup masalah yang berkaitan dengan penelitian ini sangat luas, maka permasalahan dibatasi pada masalah-masalah pokok yang dijadikan fokus pembahasan sebagai berikut :

1. Apakah ada perbedaan pendapatan rumah tangga miskin sebelum dan sesudah digulirkannya program pengentasan kemiskinan perkotaan ?
2. Bagaimana hubungan faktor umur, pendidikan, bantuan modal, jumlah tanggungan, pengalaman usaha, jenis usaha, dan biaya pengeluaran usaha dengan peningkatan pendapatan rumah tangga miskin ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan pendapatan rumah tangga miskin sebelum dan sesudah digulirkannya program pengentasan kemiskinan di perkotaan.
2. Untuk mengetahui hubungan faktor umur, pendidikan, jumlah tanggungan, pengalaman usaha, bantuan modal, jenis usaha, dan biaya pengeluaran usaha dengan peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Kepentingan akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan aspek teoretis yang dapat menambah dan mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan serta referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji lebih jauh pada aspek yang berbeda tentang program pengentasan kemiskinan perkotaan.
2. Kepentingan praktis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam mengevaluasi pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan khususnya, serta program-program lainnya yang bermuara pada upaya penanggulangan kemiskinan pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kemiskinan

Pemahaman yang sangat ekstrim tentang terminologi kemiskinan terkadang menyulitkan kita untuk membuat penggolongan tentang siapakah yang dikategorikan miskin, sementara dalam realitas kehidupan manusia tak ada orang yang tidak memiliki harta benda, meskipun apa yang dimiliki orang tersebut nilainya lebih rendah.

Shubert (dalam Poli, 1993) menyebutkan bahwa *“poverty is often defined as either absolute or relative. Absolute poverty defined as black of substance level of food. Relative poverty defined as some un satisfied basic needs or income below a relative poverty in based on some minimum based of food, food on service”*.

Kemudian Ismanto (1994) membagi kemiskinan dalam tiga dimensi yakni, dimensi sosial, dimensi politik dan dimensi ekonomi. Sehubungan dengan ketiga dimensi tersebut maka dalam kehidupan bermasyarakat dikenal kemiskinan sosial, politik dan ekonomi. Kemiskinan sosial diartikan sebagai lemahnya jaringan sosial dan struktur sosial yang kurang mendukung serta terbatasnya akses bagi seseorang untuk meningkatkan sumber daya yang ada. Dimensi kemiskinan ini mencerminkan bagaimana suatu masyarakat tidak mampu memberikan cerminan yang baik kepada anggota keluarganya maupun dirinya sendiri, khususnya yang terkait dengan hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. (Effendi, 1993).

Kemiskinan politik yaitu ketidakberdayaan atau ketidakmampuan politik suatu kelompok atau golongan masyarakat dalam mempengaruhi proses alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya dalam konteks ini adalah bagaimana kelompok masyarakat mampu memberikan tekanan atau *pressure* kepada kelompok penguasa atau pemerintah untuk mendapatkan kesetaraan dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (Bulkin, 1998).

Kemiskinan ekonomi diartikan sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Fenomena kemiskinan ekonomi umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak tersebut. (Esmara, 1986). Bentuk kemiskinan ekonomi ini merupakan bentuk kemiskinan yang paling nyata dan riil dalam masyarakat, karena kemiskinan ini akan sangat terkait dengan upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pada konteks lain, kemiskinan dapat dipandang dari berbagai segi. Pertama, dari segi subsistem, dimana penghasilan dan jerih payah seseorang hanya pas-pasan untuk dimakan saja, atau bahkan tidak cukup pula untuk itu. Kedua, segi ketidakmerataan, menekankan pada posisi relatif dari setiap golongan menurut penghasilannya terhadap posisi golongan yang lain. Ketiga, dari segi eksternal, mencerminkan konsekuensi sosial dari segi kemiskinan terhadap masyarakat sekelilingnya yaitu bagaimana kemiskinan yang berlarut-larut

mengakibatkan dampak sosial yang tidak ada habisnya. Dengan demikian kita dihadapkan pada tiga macam kemiskinan yakni kemiskinan relatif, yaitu menurut perbandingan kelas-kelas pendapatan; kemiskinan subjektif, yaitu menurut perasaan orang; dan kemiskinan absolut, yakni apabila tingkat hidup seseorang tidak memungkinkannya untuk bisa memenuhi keperluan-keperluan yang mendasar, sehingga kesehatannya baik fisik maupun mental terganggu karenanya. Dari semua keperluan dasar itu (antara lain pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan). Yang paling pokok dan memerlukan upaya untuk memperolehnya adalah pangan (Soerjani, 1987).

Papanek (dalam Raharjo, 1997) mengemukakan sebenarnya banyak tolak ukur yang dapat dijadikan pedoman bagi keluarga miskin yakni dapat diukur menurut gizi atau kalori yang dibutuhkan yaitu 1.821 kalori setiap hari, beras yang dikonsumsi dan tingkat pendapatan seseorang. Ukuran kalori ini lebih rendah seperti yang dikemukakan (Harjadi, 1985) bahwa seseorang dapat digolongkan sebagai miskin jika tidak mampu mengonsumsi antara 90-120 kalori perhari perorang, jika kurang dari itu ia tergolong miskin sekali.

Kartasmita (1996) seseorang dikatakan miskin apabila pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang antara lain meliputi pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Hal ini disebabkan terlalu besarnya jumlah keluarga atau rendahnya produktivitas atau merupakan gabungan

keduanya. Rendahnya produktivitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengangguran, setengah pengangguran, rendahnya pendidikan, rendahnya keterampilan dan rendahnya tingkat kesehatan serta gizi.

Kemudian Basri (dalam Muis, 1999) mengemukakan bahwa masyarakat miskin di pedesaan dan di perkotaan berbeda, sehingga ukuran orang miskin merupakan ukuran relatif, namun yang pasti bahwa orang miskin itu tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan maupun sandang secara minimal.

Badan Pusat Statistik (BPS, 1996) menetapkan 52 jenis komoditi pangan yang layak dikonsumsi seseorang agar dapat hidup sehat dengan jumlah kandungan kalori 2100 kalori perkapita perhari. Paket komoditi pangan yang ditetapkan sudah dianggap dapat mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah. Sedangkan paket komoditi bukan pangan yang terpilih terdiri atas 46 jenis komoditi/pengeluaran. Nilai rupiah dari dua jenis komoditi/pengeluaran tersebut menghasilkan garis kemiskinan untuk wilayah pedesaan sebesar Rp. 27,413,- perkapita perbulan dan wilayah perkotaan sebesar Rp. 38,246,- perkapita perbulan.

Dari beberapa definisi kemiskinan tersebut dengan jelas memperlihatkan bahwa secara definisi maupun secara nyata konteks kemiskinan merupakan hal yang sangat nyata dan riil dalam masyarakat. Karena kemiskinan itu sendiri terkait dengan semua aspek kehidupan dalam masyarakat yang harus dipenuhi oleh seseorang atau keluarga.

B. Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Program pengentasan kemiskinan perkotaan (P2KP) secara nasional dilaksanakan sejak tahun 1999 yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan struktural maupun kemiskinan yang diakibatkan oleh krisis ekonomi tahun 1997. P2KP tahap I dilakukan di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa yang mencakup 2.600 kelurahan/desa di 59 kota/kabupaten. P2KP tahap I ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat akibat krisis ekonomi tetapi juga bersifat strategis, karena dalam kegiatannya disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang memperkuat perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang. Program ini diterapkan dengan harapan dapat tercipta suatu kelembagaan masyarakat yang secara generik disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), melalui penggalan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Melanjutkan perkembangan yang cukup baik pada pelaksanaan P2KP tahap I, pada tahun 2002 diluncurkan P2KP tahap II sebagai upaya menanggulangi persoalan kemiskinan di perkotaan pada provinsi-provinsi di pulau Kalimantan (kecuali Kalimantan Timur), pulau Sulawesi, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jawa bagian Selatan. Selanjutnya mencakup 79 kota/kabupaten di 2.227 kelurahan/desa. Konsep P2KP tahap II dikembangkan dengan berbasis pada pembelajaran yang diperoleh dari hasil pelaksanaan P2KP tahap I, yang berintikan pada pemberdayaan

masyarakat kelurahan/desa, khususnya kelompok masyarakat miskin melalui penguatan atau pengokohan kelembagaan masyarakat.

Pengembangan konsep P2KP dilakukan dengan menambahkan komponen kegiatan "**kemitraan**" yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET), yang ditujukan untuk mendorong kemitraan dan sinergi antara masyarakat dengan pihak pemerintah daerah yang didukung oleh kelompok peduli. Hal ini dilakukan dengan keyakinan bahwa kemitraan merupakan faktor kunci yang dapat menjamin keberlanjutan dari upaya penanggulangan kemiskinan secara mandiri. Sebagai *existing agency* di Pusat adalah Ditjen Perumahan dan Permukiman Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah, di Provinsi dan Kota/Kabupaten dilaksanakan oleh Bappeda masing-masing daerah.

Kabupaten Enrekang adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan sebagai penerima, pelaksana serta pemanfaat program P2KP di bawah koordinasi Bappeda mengarahkan kegiatannya pada sosialisasi tahap awal kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran di 16 kelurahan/desa dalam wilayah Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana sebagai lokasi program pada tahun 2002.

Tahun Anggaran 2003 program diarahkan kepada kegiatan dalam kerangka penguatan kelembagaan atau Lembaga Ekonomi Rakyat (LER) di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan keterampilan, mendorong hidupnya kembali lembaga-lembaga formal maupun informal yang ada dalam masyarakat.

Selanjutnya diharapkan masyarakat dapat menggali dan mengenali potensi dan permasalahannya serta tingkat kemiskinan di wilayah masing-masing, sehingga masyarakat dapat menemukannya sendiri. Untuk tahapan berikutnya yaitu pencairan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) yang ditujukan untuk pengembangan modal usaha ekonomi melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada masing-masing kelurahan/desa sasaran program.

C. Keaktifan Keluarga dalam Mengelola Usaha

Pangestuti (1990) yang memperluas tentang kemandirian ekonomi wanita dan implikasinya, dengan melihat perbedaan kelas sosial pedesaan Jawa, yakni kelompok miskin yang hidupnya serba kekurangan dan kelompok kaya yang serba cukup berlebihan. Dengan melihat perbedaan kelas sosial nampak bahwa semakin miskin wanita itu semakin banyak bekerja di sektor publik di bidang wanita dari kelompok kaya. Dalam hal ini diartikan bahwa wanita dari golongan miskin lebih mandiri secara ekonomi dari pada wanita golongan kaya.

Keaktifan keluarga, khususnya ibu rumah tangga dalam kegiatan ekonomi mempunyai kemungkinan adanya hubungan dengan peningkatan pendapatan, sebab faktor-faktor kesertaan ibu rumah tangga dalam melakukan aktivitas ekonomi untuk mendapatkan penghasilan dapat dipengaruhi oleh adanya faktor umur, pendidikan, jenis usaha yang dikelola, jumlah anggota keluarga (anak), modal kerja yang digunakan, bentuk usaha yang ditekuni dan pengeluaran biaya usaha. Beberapa faktor tersebut secara teoretis dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Umur

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS dengan menggunakan *The Labor Force Concept*, menetapkan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas sebagai penduduk usia kerja di Indonesia. Kemudian penelitian Adilson (1989) menggunakan data *Current Population Survey* (CPS) menemukan kecenderungan bahwa pada umur muda 15 – 35 tahun terjadi kenaikan pendapatan mengikuti kenaikan umur, tetapi setelah mencapai umur 36 – 65 tahun pendapatan relatif mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya umur seseorang.

Papayungan (1995) mengemukakan, khusus untuk wanita status kawin mempunyai anak menurut kelompok umur tua maupun muda banyak memilih pekerjaan pada sektor informal, umur sangat mempengaruhi aktivitas seseorang dalam melakukan suatu kegiatan, maka semakin tua umur seseorang relatif secara fisik mengalami penurunan.

Hasil penelitian Maria (1984) menunjukkan, bahwa wanita kelompok umur 30 – 39 tahun memperlihatkan partisipasi yang sangat tinggi dalam melakukan aktivitas ekonomi. Tingginya tingkat partisipasi kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa pada umur itu wanita status kawin merasakan semakin besar pula biaya rumah tangga yang diperlukan.

Jadi umur yang dalam teori ketenagakerjaan disebutkan usia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan,

dimana makin muda usia seseorang makin enerjik (produktif) melakukan usaha untuk meningkatkan pendapatan, terutama pada usia produktif utama 35 – 49 tahun.

2. Pendidikan

Standing dan Boserup (1981) mengemukakan pendidikan akan mempengaruhi kemampuan dan keahlian seseorang, di samping pendidikan itu juga meningkatkan aspirasi dan harapan seseorang akan penghasilan dan kehidupan yang lebih baik.

Arief (1986) faktor pendidikan diperlukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan serta sikap angkatan kerja terdidik sebagai faktor-faktor penentu untuk menjadi lebih produktif. Jadi pendidikan mempunyai hubungan positif dengan pendapatan.

3. Jumlah Anggota Keluarga (Anak)

Sayogyo (1990) menyatakan bahwa faktor jumlah anggota keluarga (anak) turut berpengaruh terhadap keikutsertaan wanita dalam usaha (pekerjaan). Oleh karena itu ibu-ibu yang mempunyai anak banyak waktunya sangat terbatas untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Kasnawi (1983) menyatakan semakin kecil anggota rumah tangga akan semakin ringan beban rumah tangga tersebut. Namun demikian, jumlah anggota rumah tangga produktif secara ekonomi dapat pula menggambarkan kemampuan rumah tangga.

Kondisi pada keluarga miskin, pada kenyataannya jumlah tanggungan yang besar justru menjadi beban ekonomi. Apalagi

tanggungannya tersebut (anak) masih berada pada usia non produktif atau usia sekolah. Sehingga jumlah anak yang banyak akan berpengaruh negatif terhadap upaya peningkatan produktivitas (pendapatan) rumah tangga dalam kegiatan ekonomi.

4. Modal Usaha

Samuelson (1986) mengemukakan modal merupakan faktor produksi penggerak untuk mendapatkan produktivitas dan jasa di samping faktor-faktor produksi lainnya, seperti tanah dan tenaga kerja.

Program P2KP melalui bantuan modal usaha merupakan sumber modal dalam melakukan kegiatan usaha ekonomi. Hal ini telah diprogramkan sedemikian rupa sehingga para keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I melalui program ini akan memperoleh dukungan modal secara bergulir dengan mudah dan murah dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

5. Pengalaman Usaha

Pengalaman dalam menjalankan suatu usaha dapat diartikan sebagai lamanya seseorang menekuni pekerjaan. Becker (1993) mendefinisikan bahwa *human capital* dari pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) yang dimiliki seseorang akan mendorong produktivitas kerja seseorang dan pada gilirannya akan menerima balas jasa berupa pendapatan atau upah yang diasumsikan sama dengan produktivitas marginal seseorang. Kemudian Williams (2000), menjelaskan bahwa

pengalaman kerja akan mendorong ke arah peningkatan penerimaan pendapatan di masa datang.

Hal lain menurut Anderson dan Becker (1993) untuk menghasikan seorang insinyur yang dapat mendisain peralatan secara tepat, diperlukan pendidikan dalam waktu bertahun-tahun. Pelatihan dan pengalaman seorang dokter harus dilakukan selama mungkin sebelum dapat melakukan bedah saraf dengan berhasil. Akumulasi modal manusia seperti diatas, memberikan dorongan dan kontribusi besar bagi produktivitas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengalaman seseorang dalam menjalankan usaha tertentu turut menentukan peningkatan pendapatannya.

6. Jenis (bentuk) Usaha

Kasnawi (1985) mengemukakan tenaga kerja wanita tidak terikat oleh jadwal kegiatan yang ketat, seperti halnya kalau ia bekerja di sektor modern. Demikian pula, jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan di rumah sendiri seperti industri kecil, kerajinan tangan, pengelolaan bahan makanan untuk dijual, serta kedai-kedai kecil, kesemuanya dapat dilakukan tanpa menghambat pelaksanaan tugas domestik kaum wanita. Namun demikian, kegiatan ini sangat berkaitan dengan produktivitas.

Pujiwati (1985) peranan wanita yang besar di bidang perdagangan kecil (berjualan bahan makanan yang sudah masak, barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti garam, minyak tanah dan sebagainya).

7. Pengeluaran Biaya Usaha

Pangestuti (1990) dalam temuannya mengemukakan ketidakjelasan pengeluaran kegiatan ekonomi wanita daerah pedesaan semakin efisien, pengeluaran rumah tangga, berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Pengeluaran biaya yang terjadi pada kegiatan ekonomi produktif rumah tangga adalah merupakan bagian dari proses produksi, termasuk biaya transportasi.

Semakin efisien pengeluaran biaya usaha maka biaya produksi juga akan semakin hemat. Hal ini berarti juga jumlah penghasilan yang diperoleh akan semakin besar. Dengan demikian pendapatan keluarga miskin akan semakin meningkat pula.

D. Konsep Pendapatan

Tingkat pendapatan (*income*) dan tingkat pengeluaran (*expenditure*) rumah tangga merupakan indikator penting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan rumah tangga, mampu atau tidak mampukah keluarga tersebut (Pujiwati, 1985).

Mengkaji konsep pendapatan, sangat berkaitan dengan kebutuhan kehidupan manusia yang harus dipenuhi, bagaimanapun manusia memerlukan konsumsi yang diharapkan untuk hidup secara layak. Karena itu diperlukan adanya dukungan pendapatan untuk memperoleh konsumsi yang diharapkan dan layak menurut ukuran kesehatan.

Ananta (1993) mengemukakan pendapatan merupakan sumber untuk memperoleh jenis kombinasi konsumsi yang diinginkan, karenanya pendapatan adalah variabel yang merupakan pembatas akan apa yang dapat dikonsumsi oleh seorang individu.

Pendapatan rumah tangga, dapat dilakukan melalui dua metode perhitungan, yaitu metode pengeluaran dan metode penerimaan. Metode penerimaan pendapatan rumah tangga yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan semua penerimaan rumah tangga dalam kurun waktu tertentu, baik yang diperoleh dari usaha pokok maupun usaha sampingan. Sedangkan metode pengeluaran rumah tangga diperoleh dengan jalan menjumlahkan semua pengeluaran rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Badan Pusat Statistik (1985) konsep dari segi pendapatan perkapita dan pengeluaran perkapita, pendapatan perkapita adalah pendapatan yang diperoleh orang perorangan atas kualitas faktor-faktor ekonomis (produksi) yang dimiliki dan nilai yang diterima atas faktor-faktor tersebut. Pendapatan nominal setiap rumah tangga atau penduduk akan ditentukan oleh sumber daya produktif yang dimilikinya. Sedangkan pendapatan perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama periode tertentu (biasanya perbulan) dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Soekartawi (1995) mengemukakan bahwa pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan semua biaya yang dikeluarkan selama

melaksanakan kegiatan usaha. Dengan demikian ada beberapa pengertian yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pendapatan antara lain :

- a. Penerimaan, adalah jumlah produksi yang dihasilkan dalam suatu kegiatan usaha dikalikan dengan harga jual yang berlaku di pasar.
- b. Biaya produksi, adalah semua pengeluaran yang dinyatakan dengan uang yang diperlukan untuk menghasilkan produksi.
- c. Pendapatan bersih, adalah penerimaan kotor yang dikurangi dengan biaya variabel dan biaya tetap.

Dari beberapa pengertian tentang pendapatan yang telah dikemukakan, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan keluarga miskin adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha ekonomi produktif setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengeluaran usaha, baik biaya yang termasuk biaya produksi maupun biaya lainnya antara lain retribusi dan transportasi.

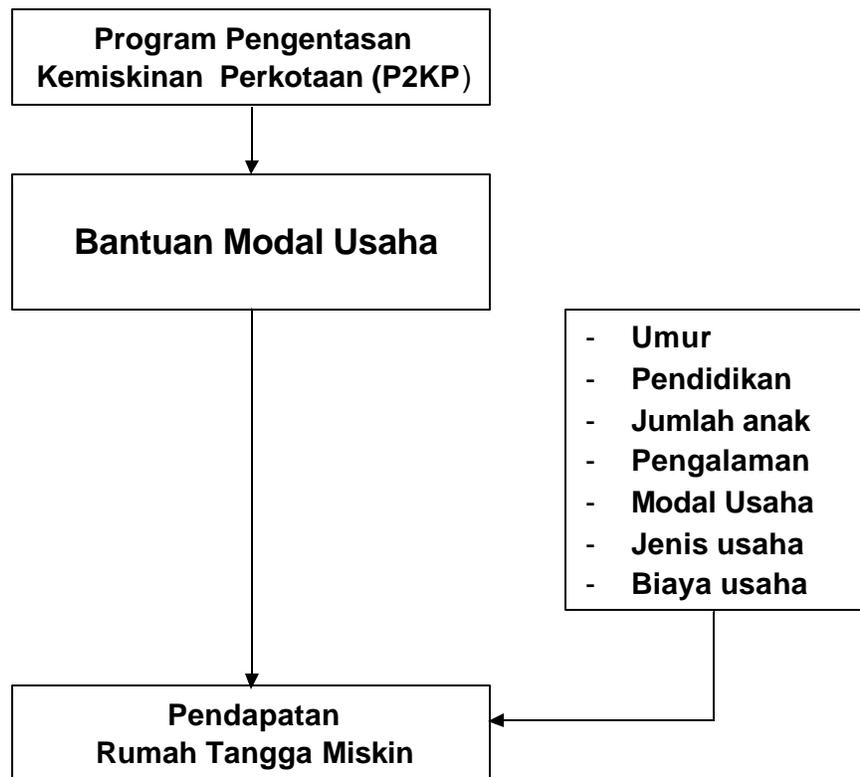
E. Kerangka Pikir

Secara operasional Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang ingin dikaji dalam penelitian ini yaitu bantuan langsung kepada masyarakat berupa bantuan permodalan kepada keluarga miskin (Prasejahtera dan Sejahtera I) yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif sehingga penghasilannya

dapat meningkat. Kegiatan ekonomi atau pengembangan usaha keluarga tersebut dapat dikelola oleh laki-laki (suami) selaku kepala keluarga maupun wanita (ibu rumah tangga) untuk menunjang pendapatan rumah tangga. Peningkatan pendapatan rumah tangga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga ke arah kehidupan yang lebih baik, khususnya rumah tangga yang tergolong miskin agar dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum secara layak.

Proses peningkatan pendapatan rumah tangga miskin di Kecamatan Enrekang dapat dilihat dari pendapatan peserta program pengentasan kemiskinan di wilayah perkotaan sebelum dan sesudah memperoleh bantuan modal usaha. Pendapatan keluarga miskin yang tergabung melalui wadah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) akan dilihat sebagai variabel terpengaruh dan faktor-faktor keikutsertaan dalam program P2KP sebagai variabel mempengaruhi.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada skema kerangka pikir penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Dampak Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) terhadap Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

F. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan secara signifikan antara pendapatan keluarga miskin sebelum dan sesudah mengikuti program P2KP.
2. Umur kepala keluarga berhubungan dengan tingkat partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Kepala keluarga yang berumur di atas 50 tahun cenderung partisipasinya dalam kegiatan ekonomi semakin menurun sehingga pendapatannya juga semakin berkurang.
3. Tingkat pendidikan berhubungan positif dengan pendapatan. Makin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga, semakin tinggi kemampuan dan keterampilan dalam mengelola usaha produktif.
4. Makin banyak jumlah tanggungan (anak) pada usia 0 – 14 tahun yang dimiliki suatu keluarga makin kecil kesempatan yang dimiliki orang tua untuk melaksanakan aktivitas ekonomi, terutama pada ibu rumah tangga. Jumlah anak berhubungan negatif dengan pendapatan keluarga miskin.
5. Bantuan modal usaha berhubungan positif dengan pendapatan keluarga. Makin besar jumlah bantuan yang diterima dan pemupukan modal usaha, makin mudah seseorang dalam menjalankan aktivitas ekonomi rumah tangga sehingga produktivitas makin meningkat.
6. Pengalaman usaha atau pengalaman kerja berhubungan positif dengan pendapatan. Semakin lama seseorang menekuni usaha

tertentu akan semakin terampil dan mendorong ke arah peningkatan produktivitas serta penerimaan pendapatan di masa datang.

7. Jenis usaha menentukan besarnya penghasilan keluarga. Kepala keluarga yang menggeluti pekerjaan pada sektor formal akan lebih tinggi pendapatannya daripada yang bekerja pada sektor informal.
8. Makin efisien pengeluaran biaya usaha, makin besar keuntungan yang diperoleh. Pengeluaran biaya usaha berhubungan positif dengan pendapatan keluarga.